

PENETAPAN RENJA

2026



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**

KATA PENGANTAR

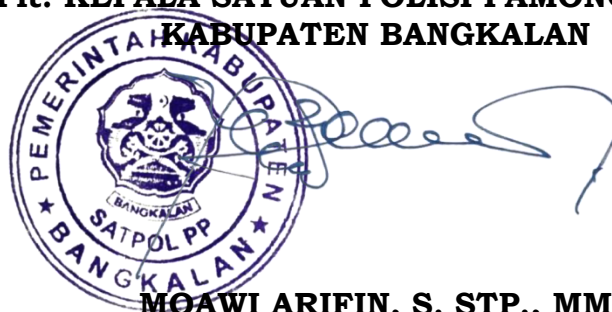
Dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah Swt karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga “Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan” Tahun Anggaran 2026 ini dapat disusun.

Melalui penyusunan Rankhir Renja ini diharapkan akan diperoleh secara jelas dan rinci gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Renja.

Rancangan Akhir Renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kita semua.

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



MOAWI ARIFIN, S. STP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19800212 199810 10001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
Bab 1	Pendahuluan.....
1.1	Latar Belakang.....
1.2	Landasan Hukum.....
1.3	Maksud dan Tujuan.....
1.4	Sistematika Penulisan.....
Bab 2	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD.....
2.3	Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....
Bab 3	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....
3.1	Tujuan dan Sasaran Renja PD.....
3.2	Matriks Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah.....
Bab 4	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Bangkalan
Bab 5	Penutup.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Bangkalan.....
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran PD
Tabel 3.2	Matriks Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Rencana Kerja (RENJA) PD mempunyai kedudukan yang strategis antara lain:

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja PD bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan Perangkat Daerah, memberikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bangkalan tahun 2026, dan memberikan gambaran tentang target kinerja yang akan dicapai tahun 2026.

Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Proses Penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Renja. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja PD didasarkan kepada Perubahan Rencana Strategis 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Renstra dan renja K/L;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1/D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor /).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 adalah :

a. Maksud

Untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan secara umum yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2026

b. Tujuan

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026;
- 2) Untuk memberikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bangkalan tahun 2026;
- 3) Sebagai panduan mengevaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bangkalan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber dana yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Bangkalan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 SATPOL PP Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024					Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
1:05:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	38	%	38

	Kabupaten / Kota															
01.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	74	%	74	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	0	Dokumen	6	dokumen	50
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Dokumen	2	Dokumen	0
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100

1.05.0 1.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	Doku men			1	Doku men	1	Doku men	100%	1	Dokum en	2	Dokum en	100
1.05.0 1.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	Doku men			1	Doku men	1	Doku men	100%	1	Dokum en	2	Dokum en	100
1.05.0 1.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lapora n	1	Lapora n	1	Lapora n	1	Lapora n	100%	1	Lapora n	3	Lapora n	100
1.05.0 1.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6	Lapora n	6	lapora n	6	Lapora n	6	Lapora n	80%	4	Lapora n	16	Lapora n	67
1.05. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat	10 0	%	1 0 0	%	1 0 0		1 0 0	%	100 %	1 0 0	%	83	%	83

		waktu														
1.05.0 1.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113	Orang/bulan	76	Orang/bulan	100	Orang/bulan	100	Orang/bulan	100%	100	Orang/bulan	276	Orang/bulan	100
1.05.0 1.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100
1.05.0 1.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100%	9	Laporan	45	Laporan	50
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	21	%	21

1.05.0 1.2.03 .0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Doku men			1	Doku men	1	Doku men	100%	0	Dokum en	1	Dokum en	0
1.05.0 1.2.03 .0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Lapora n	7	Lapora n	7	Lapora n	7	Lapora n	100%	3	Lapora n	17	Lapora n	43
1.05. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100
1.05.0 1.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket			3 4 0	paket	3 4 0	paket	100%	0	Paket	340	Paket	0
1.05.0 1.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang			0	orang				3	Orang	3	Orang	100
1.05. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	67	%	83

1.05.0 1.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0	Paket	4	paket	4	paket	4	paket	100%	4	Paket	0	Paket	0
1.05.0 1.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	1 2	paket	1 2	paket	1 2	paket	100%	1 2	Paket	10	Paket	100
1.05.0 1.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket								1	Paket	0	Paket	0
1.05.0 1.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8	Paket	8	paket	8	paket	8	paket	100%	8	Paket	0	Paket	0
1.05.0 1.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0	Paket	1 2	paket	1 2	paket	1 2	paket	100%	1 2	Paket	0	Paket	0
1.05.0 1.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan														
1.05.0 1.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	Lapora n	6	Lapora n	1 2	lapora n	1 2	Lapora n	100%	1 2	Lapora n	2	Lapora n	50

1.05.0 1.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lapora n	4 0	Lapora n	6	Lapora n	6	Lapora n	100%	4 0	Lapora n	1	Lapora n	100
1.05. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	10 0	%	1 0 0	%	1 0 0	%	1 0 0	%	100 %	1 0 0	%			
1.05.0 1.2.07 .0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan														
1.05.0 1.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan														
1.05.0 1.2.07 .0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan														
1.05. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 0	%	1 0 0	%	1 0 0	%	1 0 0	%	100 %	1 0 0	%	33	%	50
1.05.0 1.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Lapora n	4	lapora n	4	lapora n	4	Lapora n	100%	4	Lapora n	0	Lapora n	0

1.05.0 1.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	Laporan	50
1.05.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	Laporan	50
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	84	%	100
1.05.0 1.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	Unit			1	unit	1	unit	100%	1	unit	0	unit	0
1.05.0 1.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19	Unit	19	unit	19	unit	19	unit	100%	19	Unit	19	Unit	100

	Lapangan															
1.05.0 1.2.09 .0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	1 5	Unit	6	unit	6	unit	100%	1 5	Unit	0	Unit	0
1.05.0 1.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0	Unit	1 2	unit	1 5	unit	1 5	unit	100%	6	Unit	0	Unit	0
1.05.0 1.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1	unit										
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	86	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	36	%	36
5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	86	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	60	%	60

1.05.0 2.2.01 .0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	17 9	Laporan	9 8	kasus	1 6	kasus	1 6	kasus	100%	1 7 9	kasus	10	Laporan	100
1.05.0 2.2.01 .0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	laporan	5	kasus	3	kasus	3	kasus	100%	3	kasus	1	laporan	100

1.05.0 2.2.01 .0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3	Doku men	1	Doku men	1	Doku men	0	Doku men	0%	3	Dokum en	0	Dokum en	0
1.05.0 2.2.01 .0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Doku men	1	Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100%	2	Dokum en	2	Dokum en	100
1.05.0 2.2.01 .0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	Orang	2 0	orang	2 0	orang	2 0	orang	100%	1 5	orang	0	Orang	0

1.05.0 2.2.01 .0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4	Doku men	2	Doku men	3	Doku men	3	Doku men	100%	4	Dokum en	0	Dokum en	0
1.05.0 2.2.01 .0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Doku men								1	dokum en	0	Dokum en	0
1.05.0 2.2.01 .0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Lapora n	1	lapora n	1	lapora n	1	Lapora n	100%	1	Lapora n	0	Lapora n	0
1.05. 02.2. 02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	77	%	1 0 0	%	1 0 0	%	1 0 0	%	100 %	1 0 0	%	14	%	2
1.05.0 2.2.02 .0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	18	Lapora n	3 1	Lapora n	2 5	Lapora n	2 3	Lapora n	92%	1 8	Lapora n	1	Lapora n	3

		kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/															
1.05.0 2.2.02 .0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	Laporan	6	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	0	Laporan	0	
1.05.0 2.2.02 .0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4	Laporan	5 7	Laporan						4	Laporan	0	Laporan	0	
1.05. 02.2. 03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase aparatur yang ikut pelatihan	1	Orang	1 0 0	%	1 0 0	%	1 0 0	%	100 %	1 0 0	%	0	%	0	

1.05.0 2.2.03 .01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	laporan	1	laporan								0	Laporan	0
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	10	%	100
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	20	%	0
1.05.0 3.2.02 .0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk	30	Orang	30	orang						30	Orang	0	Orang	0

1.05.0 3.2.03 .03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana														
01.05 .04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	85	%	1 0 0	%	1 0 0	%	1 0 0	%	100 %	1 0 0	%	9	%	9
1.05. 04.2. 01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran	96. 5	%	1 0 0	%	1 0 0	%	1 0 0	%	100 %	1 0 0	%	47	%	46
1.05.0 4.2.01 .0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penan ggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Doku men	1 4	Doku men	1 0	Doku men	1 0	Doku men	100%	1 0	Dokum en	2	Dokum en	50

		Setiap Tahunnya														
1.05.0 4.2.01 .0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30	Laporan	34	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	100%	35	Laporan	1	Laporan	33
1.05.0 4.2.01 .0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	40	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	100%	30	Dokumen	2	Dokumen	100
1.05.0 4.2.01 .0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	6	Unit	11	unit	8	unit	8	unit	100%	10	Unit	0	Unit	0

		Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait															
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12	Orang	39	orang	30	orang	30	orang	100%	45	Orang	0	Orang	0	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	0
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	Dokumen	0	Dokumen	0	

1.05.0 4.2.02 .0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2	Doku men			1	dokum en	1	dokum en	100%	2	Dokum en	0	Dokum en	0
1.05. 04.2. 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	20	%	0
1.05.0 4.2.04 .0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200	Orang			150	orang	150	orang	100%	200	Orang	0	Orang	0
1.05. 04.2. 05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0	%	0

	Manusia															
1.05.0 4.2.05 .0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	6	Unit			8	unit	8	unit	100%	3	Unit	0	unit	0

Evaluasi Renja tahun 2025 Satpol PP melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan sub kegiatan :
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kab/Kota

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan sub kegiatan :
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan evakuasi
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan subkegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
 - Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan perlu menentukan sasaran yang ingin dicapai. Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan menggunakan indikator yang

mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan periode 2024-2026 dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Satpol PP tentunya menghadapi kompleksitas permasalahan, terutama di bidang penegakannya. Beberapa hal yang menjadi kendala antara lain sosialisasi Perda kepada masyarakat belum dapat optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap Perda masih sangat kurang sehingga tingkat pelanggaran yang dilakukan cukup tinggi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketentramanan dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Bangkalan nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka Satpol PP Kabupaten Bangkalan menyesuaikan beberapa kebijakan pada Program kegiatan diselaraskan dengan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2026, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah			Realisasi		Proyeksi			Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP		Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani/Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan x 100%	99%	98%	98%		98%	98%	98%	98%	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP		Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	1	4	4		1	4	4	4	

4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Jumlah Mutu Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 yang harus dipenuhi	Jumlah SOP yang tersedia /Jumlah SOP yang dibutuhkan x 100%	60%	60%	70%		60%	60%	70%	70%
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Jumlah Mutu standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP yang harus dipenuhi	Jumlah sarana prasarana yang tersedia/Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan x100%	83%	83%	87%		83%	83%	87%	87%
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar		Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar/Jumlah Keseluruhan ASN Satpol PP x 100%	28%	20%	22%		28%	20%	22%	24%

7	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana x 100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah mutu tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi yang harus dilayani	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap/Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100%	64%	78%	80%		64%	78%	80%	80%	

9	Jumlah standart peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Jumlah mutu Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM yang harus dipenuhi		97	97	97		97	97	97	97	
10	Persentase standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Jumlah mutu standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material yang harus dilayani		100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
11	Jumlah Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah mutu Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi yang harus dipenuhi		6	6	11		6	6	11	11	

12	Jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran	Jumlah mutu sarana prasarana pemadam kebakaran yang harus dipenuhi		5	5	6		5	5	6	6	
13	Jumlah standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Jumlah mutu standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia yang dipenuhi		2	3	3		2	3	3	3	
14	Jumlah pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Jumlah mutu pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran yang harus dilayani		15	20	25		15	20	25	30	
15	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Jumlah mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran yang harus dilayani		57	20	25		57	20	25	30	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-undang no. 23 tahun 2013 pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat, dibentuk untuk menegakkan PerDa dan PerBup serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian, tidak akan berjalan dengan optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak terselenggara dengan baik. Oleh sebab itu ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan terciptanya kondisi Tentram, Aman, Tertib serta Perlindungan Masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1. Menjamurnya Pedagang Kaki Lima di tempat terlarang
2. Pemanfaatan lahan milik Pemkab yang dikelola oleh pihak lain
3. Terbatasnya sarana dan prasarana di lapangan serta masih kurang memadainya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Satpol PP (mobil Patroli sudah berumur, Truk Satpol PP hanya 1, belum memiliki mobil Rescue utk pelayanan Non Damkar)
4. Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal

5. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Perda dan Perkada masih rendah
6. Pelayanan Pemadaman kebakaran kurang maksimal
7. Masih memiliki satu pos untuk melayani 18 kecamatan dalam wilayah
8. Masih belum memiliki beberapa peralatan guna menunjang tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan
9. Belum maksimal dalam pencapaian standar pelayanan minimal khususnya pencapaian response time (15 menit)
10. Belum maksimalnya informasi tentang pentingnya fungsi dan keberadaan Satlinmas Desa

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Menyediakan Lokasi alternatif yang lebih terstruktur untuk PKL seperti Pasar Rakyat/ area komersial yang dikelola dengan baik
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala antar OPD terhadap pengelolaan lahan oleh pihak lain untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan awal dan peraturan yang berlaku
3. Mengajukan anggaran untuk pengadaan Sarana dan Prasarana kendaraan operasional yang memadai kepada Pemkab/pihak terkait
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penegakan perda dan Perkada melalui Pelatihan dan pendidikan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang isi dan pentingnya perda dan perkada untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
5. Pemadaman kebakaran terkendala jarak yang berjauhan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Bangkalan
6. Mengoptimalkan penempatan Pos-Pos Pemadam Kebakaran di lokasi strategis (utara, selatan dan timur) Kabupaten Bangkalan untuk meminimalkan waktu tempuh ke area-area yang rawan kebakaran
7. Mengajukan anggaran serta menentukan prioritas pengadaan peralatan esensial seperti Alat Pemadam kebakaran, peralatan penyelamatan, dan perlindungan diri untuk petugas
8. Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi, tugas dan pentingnya keberadaan Satlinmas Desa untuk meningkatkan

ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD yang memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, maka Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Caca tan Pent ing		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indika tif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuh an Dana (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten / Kota		Indeks kepuasaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1 0 0	Inde ks	12,480 ,195,7 83	Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten / Kota		Indeks kepuasaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1 0 0	Inde ks	12,170, 391,223	
1.05.01 .2.01	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran , dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan	1 0 0	%	13,899 ,950	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran , dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan	1 0 0	%	2,545,4 00	
1.05.01. 2.01.00 01	Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Doku men	3,967, 350	Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Doku men	1,413,30 0	Ran wal renja , Pene tapa

													n renja , Peru baha n Renj a
1.05.01. 2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Doku men	2,603, 050	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Doku men	65,300	RKA
1.05.01. 2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Doku men	1,834, 300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Doku men	65,300	RKA peru baha n
1.05.01. 2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Doku men	675,25 0	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Doku men	65,300	DPA

			DPA-SKPD						DPA-SKPD				
1.05.01. 2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Doku men	675,25 0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Doku men	65,300	DPA Peru baha n
1.05.01. 2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lapor an	2,344, 750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lapor an	65,300	LAKI P

1.05.01. 2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Lapor an	1,800, 000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Lapor an	515,300	Eval uasi Renj a, LKP J, PPR G
1.5.01.2 .01.000 9	Pelaksanaa n Pengumpul an Data Statistik Sektoral daerah	Sa tp ol PP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				Pelaksanaa n Pengumpul an Data Statistik Sektoral daerah	Sa tp ol PP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	290,300	
1.05.01 .2.02	Administra si Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	1 0 0	%	8,578, 171,78 3	Administra si Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	1 0 0	%	8,527,5 34,323	
1.05.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sa tp ol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 0 0	Oran g/bul an	8,572, 321,78 3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sa tp ol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 1 3	Oran g/bul an	8,525,60 4,223	

1.05.01. 2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	515,050	Laporan keuangan
1.05.01. 2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	3,850,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	1,415,050	
1.05.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun	100	%	3,300,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun	100	%	1,925,950	

1.05.01. 2.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Doku men	865,00 0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Doku men	510,900	RKB MD
1.05.01. 2.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Lapor an	2,435, 000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Lapor an	1,415,05 0	Simb ada, SKA PB
1.05.01 .2.05	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	1 0 0	%	75,000 ,000	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	1 0 0	%	-	
1.05.01. 2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-	
1.05.01. 2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Sa tp ol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	9	Oran g	75,000 ,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Sa tp ol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	0	Oran g	-	

	n Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				n Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
1.05.01.2.06	Administra si Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	59,512,250	Administra si Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	21,445,550	
1.05.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
1.05.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	16,795,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	11,445,550	Penyediaan Tiap Triwulan
1.05.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	850,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	-	

1.05.01. 2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	9,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	5,000,000	Penyediaan Tiap Triwulan
1.05.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 2	Paket	3,366,350	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sa tp ol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	Paket	-	
1.05.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	Dokumen	-	
1.05.01. 2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 2	Laporan	3,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	Laporan	-	
1.05.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 0	Laporan	25,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	5,000,000	

1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100	%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100	%	-	
1.05.01.2.07.00.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	unit	-	
1.05.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	unit	-	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	unit	-	
1.05.01.2.07.00.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	unit	-	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3,582,080,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3,527,980,000	
1.05.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Laporan	-	

1.05.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 2	Lapor an	54,000 ,000	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 2	Lapor an	150,000, 000	Penyedia an Tiap Triwulan
1.05.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2	Lapor an	3,527, 080,00 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2	Lapor an	3,377,98 0,000	
1.05.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	1 0 0	%	168,23 1,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	1 0 0	%	88,960, 000	
1.05.01. 2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Sa tp ol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1	Unit	26,371 ,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Sa tp ol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	0	Unit	-	

	Kendaraan Dinas Jabatan		Pajaknya				Kendaraan Dinas Jabatan		Pajaknya				
1.05.01. 2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sa tp ol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 9	Unit	135,16 0,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sa tp ol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 9	Unit	88,960,0 00	
1.05.01. 2.09.00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Sa tp ol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 5	Unit	5,500, 000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Sa tp ol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
1.05.01. 2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sa tp ol PP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	Unit	1,200, 000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sa tp ol PP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0	Unit	-	
1.05.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sa tp ol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sa tp ol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	Unit	-	

1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	86	%	665,655,650	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	86	%	644,018,150	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	86	%	511,695,650	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	86	%	470,027,150	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanaan	Sa tp ol pp	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanaan, dan	179	Laporan	150,000,000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanaan	Sa tp ol pp	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanaan, dan	179	Laporan	101,500,000	

	n, dan Pengawasan		Pengawasan				n, dan Pengawasan		Pengawasan				
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	Sa tp ol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	Laporan	1,500,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	Sa tp ol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	Laporan	1,500,000	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	3	Dokumen	60,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	3	Dokumen	60,000,000	

	/Kota		Kabupaten/Kota				/Kota		Kabupaten/Kota				
1.05.02. 2.01.00 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Dokumen	50,500 ,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Dokumen	50,000,0 00	
1.05.02. 2.01.00 14	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satpol PP	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	1 5	Orang	2,000, 000	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satpol PP	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	0	Orang	-	
1.05.02. 2.01.00 06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	4	Dokumen	240,69 5,650	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	1	Dokumen	253,027, 150	

	dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				
1.05.02.2.01.00.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Doku men	2,500,000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Doku men	2,500,000	
1.05.02.2.01.00.17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Lapor an	4,500,000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Lapor an	1,500,000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wal		Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	77	%	153,960,000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wal		Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	77	%	169,991,000	

	i Kota						i Kota						
1.05.02. 2.02.00 10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Sa tp ol PP	jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi	1 8	Lapor an	149,46 0,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wal i Kota	Sa tp ol PP	jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi	1 8	Lapor an	169,531, 000	
1.05.02. 2.02.00 12	Pengawasa n atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaa n Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Sa tp ol PP	jumlah penyelenggara an pengawasan	3	Lapor an	2,500, 000	Pengawasa n atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaa n Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wal i Kota	Sa tp ol PP	jumlah penyelenggara an pengawasan	0	Lapor an	-	
1.05.02. 2.02.00 11	Penangana n atas Pelanggara n Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah	Sa tp ol PP	jumlah penanganan pelanggaran Perda	4	Lapor an	2,000, 000	Penangana n atas Pelanggara n Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wal i Kota	Sa tp ol PP	jumlah penanganan pelanggaran Perda	4	Lapor an	460,000	

1.05.02 .2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota		jumlah aparatur yang ikut pelatihan	1	Oran g	-	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota		jumlah aparatur yang ikut pelatihan	1	Oran g	4,000,0 00	
1.05.02. 2.03.00 06	Pengemban gan Kapasitas dan Karier PPNS	Sa tp ol pp	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggara an Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	0	Lapor an	-	Pengemban gan Kapasitas dan Karier PPNS	Sa tp ol pp	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggara an Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Lapor an	4,000,00 0	
1.05.03	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA		Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	1 0 0	%	180,00 0,000	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA		Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	1 0 0	%	105,000 ,000	

1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	180,000,000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	105,000,000	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat penanggulangan Bencana (TRCPB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30	Orang	5,000,000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30	Orang	5,000,000	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	80	orang	175,000,000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	80	orang	100,000,000	

			bencana						bencana				
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	85	%	300,000,000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	85	%	321,137,500	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota		Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran	96.5	%	144,720,000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota		Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran	96.5	%	166,444,100	

1.05.04. 2.01.00 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Setiap Tahunnya	1 0	Doku men	71,031 ,232	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Setiap Tahunnya	2	Doku men	28,862,5 00	
1.05.04. 2.01.00 02	Pemadama n dan Pengendalia n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	3 5	Lapor an	33,700 ,000	Pemadama n dan Pengendalia n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Sa tp ol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	3 0	Lapor an	118,830, 000	
1.05.04. 2.01.00 03	Penyelamat an dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulanga	3 0	Doku men	22,150 ,000	Penyelamat an dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulanga	4 0	Doku men	10,000,0 00	

			n Kebakaran dan Non Kebakaran						n Kebakaran dan Non Kebakaran				
1.05.04. 2.01.00 17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sa tp ol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 0	Unit	6,570, 768	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sa tp ol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6	Unit	3,831,60 0	
1.05.04. 2.01.00 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Sa tp ol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 5	Oran g	11,268 ,000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Sa tp ol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 2	Oran g	4,920,00 0	

1.05.04 .2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		100 %	2,090, 000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		100 %	1,096,4 00	
1.05.04. 2.02.00 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ge dung/Lingkun gan yang Dipersyaratka n Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Doku men	1,360, 000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ge dung/Lingkun gan yang Dipersyaratka n Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Doku men	846,400	
1.05.04. 2.02.00 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ge dung/Lingkun gan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi	2	Doku men	730,00 0	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Sa tp ol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ge dung/Lingkun gan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi	2	Doku men	250,000	

			Kebakaran						Kebakaran				
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100	%	150,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100	%	150,000,000	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200	Orang	150,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200	Orang	150,000,000	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan	100	%	3,190,000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Persentase sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang diadakan	100	%	3,597,000	

1.05.04. 2.05.00 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Sa tp ol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3	Unit	3,190,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Sa tp ol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	6	Unit	3,597,000	
TOTAL						13,625,851,433	TOTAL						13,240,546,873.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan dalam hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Dari uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP

a. Tujuan

Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis adalah *“Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat”*.

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan menentukan sasaran utama pelaksanaan tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Sebagai Berikut:

- a) Penguatan Penegakan Trantibumlinmas
- b) Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time
- c) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

3.2. Matriks Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

Tema Pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" yang ditetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1:

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prioritas Nasional 2:

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Prioritas Nasional 3:

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas Nasional 4:

Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (sdm), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda

(generasi millennial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 5:

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas Nasional 6:

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Prioritas Nasional 7:

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Prioritas Nasional 8:

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan arah pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pembangunan wilayah strategis dan peningkatan produktivitas menuju kemandirian pangan dan energi” dengan ditetapkan Prioritas sebagai berikut:

Prioritas Provinsi 1:

Jatim Sejahtera – Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan Ketimpangan.

Prioritas Provinsi 2:

Jatim Kerja – Memperluas lapangan kerja yang berkualitas.

Prioritas Provinsi 3:

Jatim Cerdas – Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan.

Prioritas Provinsi 4:

Jatim Sehat – Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan Berkeadilan.

Prioritas Provinsi 5:

Jatim Akses – Memperkuat Infrastruktur Konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.

Prioritas Provinsi 6:

Jatim Berkah Amanah – Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya guna dan Partisipatif.

Prioritas Provinsi 7:

Jatim Agro – Meningkatkan Kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.

Prioritas Provinsi 8:

Jatim Harmoni – menjaga terwujudnya Masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Prioritas Provinsi 9:

Jatim Lestari – Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Perubahan arah kebijakan tersebut disinergikan dengan prioritas nasional sebagai berikut:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan;

- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Proritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang mendukung Program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional:

- Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2. Prioritas Provinsi:

- Jatim Harmoni - menjaga terwujudnya Masyarakat yang harmonis dan inklusif.
- Jatim Lestari – Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Prioritas Kabupaten:

- Bangkalan Sejahtera (Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik)
- Bangkalan Melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan).

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan Perangkat Daerah					Sasaran Perangkat Daerah					Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi	Target		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	79.53	79.75	79.85	Penguatan Penegakan Trantibummas	Persentase penurunan pelanggaran terhadap trantibum dan perda/perkada	7.95%	8.02%	8.72%	
					Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80.5%	86.5%	88%	
					Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan Trantibum	Nilai SAKIP PD	60.30	61.25	61.85	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	86.00	86.15	

Tabel 3.2
Matriks Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENJA 2026	KETERANGAN
	Nasional	Provinsi	Daerah				
I				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	12,170,391,223	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan	2,545,400	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1,413,300	

2	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 65,300	
3	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 65,300	
4	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 65,300	
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 65,300	

6	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 65,300	
7	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 515,300	
8	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Rp 290,300	
2	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	8,527,534,323	

9	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8,525,604,23	
10	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 515,050	
11	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 1,415,050	
3	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun	1,925,950	

12	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 510,900	
13	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1,415,050	
4	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	-	
14	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp -	

15	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp -	
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21,445,550	
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp -	
17	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 11,445,550	

18	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp -	
19	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 5,000,000	
20	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp -	
21	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp -	

22	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp -	
23	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 5,000,000	
6	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,527,980,000	
24	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp -	

25	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 150,000,000	
26	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 3,377,980,000	
7	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	88,960,000	
27	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rp -	

28	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 88,960,000	
29	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Rp -	
30	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Rp -	
31	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Melayani, Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Rp -	
II				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	644,018,150	

8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	470,027,15 0
---	---	--	---	--	---	-------------------------

32	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp 101,500,000	
33	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa yang Dilakukan Penindakan	Rp 1,500,000	

	makmur						
34	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 60,000,000	

35	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 50,000,000	
36	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Rp -	

	makmur						
37	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 253,027,150	

38	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Rp 2,500,000	
39	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Rp 1,500,000	

	makmur						
9	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	169,991,000	

40	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 169,531,000	
41	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp -	

	makmur						
42	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Rp 460,000	

10	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	jumlah aparatur yang ikut pelatihan	4,000,000
----	---	--	---	--	--	------------------

43	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Rp 4,000,000	
III				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	105,000,000	

11	<p>Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>	<p>Jatim Lestari - Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.</p>	<p>Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik</p>	<p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>	<p>Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</p>	<p>105,000,000</p>
----	---	--	--	---	---	---------------------------

44	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Lestari - Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Rp 5,000,000	
45	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Jatim Lestari - Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Rp 100,000,000	

	makmur						
12	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Lestari - Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	
46	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Jatim Lestari - Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Rp -	

	mencapai masyarakat yang adil dan makmur						
IV				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	321,137,500	
13	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran	166,444,100	

47	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Rp 28,862,500	
48	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 118,830,000	

	makmur						
49	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp 10,000,000	

50	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Rp 3,831,600	
51	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Rp 4,920,000	

	makmur						
14	<p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>	<p>Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.</p>	<p>Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik</p>	<p>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p>	<p>Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p>	<p>1,096,400</p>	

52	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Rp 846,400	
53	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp 250,000	

	makmur						
15	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	150,000,000	

54	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Rp 150,000,000	
----	--	---	--	--	--	----------------	--

16	<p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>	<p>Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.</p>	<p>Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik</p>	<p>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</p>	<p>Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan</p>	<p>3,597,000</p>
----	--	---	--	---	---	-------------------------

55	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.	Bangkalan Sejahtera, Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Rp 3,597,000	
TOTAL						13,240,546 ,873	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun Berikutnya

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif	Su mbe r Dan a		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		10 0	Indeks	12,170,3 91,223	APB D	DAUM	1 0 0	Indeks	9,628,127,223
5.01.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan,Peng anggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan		10 0	%	2,545,40 0	APB D	DAUM	1 0 0	%	2,545,400

5.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	3	Dokumen	1,413,300	APB D	DAUM	3	Dokumen	Rp 1,414,800
5.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	65,300	APB D	DAUM	1	Dokumen	Rp 65,050
5.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	65,300	APB D	DAUM	1	Dokumen	Rp 65,050
5.01.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	65,300	APB D	DAUM	1	Dokumen	Rp 65,050
5.01.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Satpol PP	1	Dokumen	65,300	APB D	DAUM	1	Dokumen	Rp 65,050

		Dokumen Perubahan DPA-SKPD									
5.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	1	Laporan	65,300	APB D	DAUM	1	Laporan	Rp 65,050
5.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	6	Laporan	515,300	APB D	DAUM	6	Laporan	Rp 515,050
1.5.01.2.01 .0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Satpol PP	1	data	290,300	APB D	DAUM	1	data	Rp 290,300

5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu		100	%	8,527,534,323	APB D	DAUM	100	%	8,748,610,323
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	113	Orang/bulan	8,525,604,223	APB D	DAUM	113	Orang/bulan	Rp 8,746,680,223
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	1	Laporan	515,050	APB D	DAUM	1	Laporan	Rp 515,050
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Satpol PP	18	Laporan	1,415,050	APB D	DAUM	18	Laporan	Rp 1,415,050

		an/Semesteran SKPD									
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun		100	%	1,925,950	APBD	DAUM	100	%	1,925,950
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	510,900	APBD	DAUM	1	Dokumen	Rp 510,900
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	7	Laporan	1,415,050	APBD	DAUM	7	Laporan	Rp 1,415,050

5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	Persentase Administrasi Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100	%	-	APB D	DAUM	100	%	13,450,000
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Satpol PP	0	Paket	-	APB D	DAUM	0	Paket	Rp -
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Satpol PP	9	Orang	-	APB D	DAUM	2	Orang	Rp 13,450,000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	21,445,550	APB D	DAUM	100	%	36,445,550

5.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	0	Paket	-	APB D	DAUM	0	Paket	Rp -
5.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	12	Paket	11,445,5 50	APB D	DAUM	1 2	Paket	Rp 11,445,550
5.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Satpol PP	0	Paket	-	APB D	DAUM	0	Paket	Rp -
5.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Satpol PP	8	Paket	5,000,00 0	APB D	DAUM	8	Paket	Rp 5,000,000
5.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Satpol PP	0	Paket	-	APB D	DAUM	0	Paket	Rp -

5.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Satpol PP	0	Dokumen	-	APB D	DAUM	0	Dokumen	Rp -
5.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	0	Laporan	-	APB D	DAUM	0	Laporan	Rp -
5.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	1	Laporan	5,000,000	APB D	DAUM	40	Laporan	Rp 20,000,000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD		100	%	-	APB D	DAUM	100	%	-

1.05.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Satpol PP	0	unit	-	APB D	DAUM	0	Unit	Rp -
1.05.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Satpol PP	0	unit	-	APB D	DAUM	0	Unit	Rp -
1.05.01.2.0 7.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Satpol PP	0	unit	-	APB D	DAUM	0	Unit	Rp -
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	3,527,980,000	APB D	DAUM	100	%	730,440,000
5.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	4	Laporan	-	APB D	DAUM	0	Laporan	Rp -

5.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Satpol PP	12	Laporan	150,000,000	APB D	DAUM	12	Laporan	Rp 100,000,000
5.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Satpol PP	12	Laporan	3,377,980,000	APB D	DAUM	12	Laporan	Rp 630,440,000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100	%	88,960,000	APB D	DAUM	100	%	94,710,000

5.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Satpol PP	1	Unit	-	APB D	DAUM	0	Unit	Rp -
5.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Satpol PP	19	Unit	88,960,000	APB D	DAUM	19	Unit	Rp 88,960,000
5.01.01.2.0 9.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Satpol PP	15	Unit	-	APB D	DAUM	15	Unit	Rp 4,470,000
5.10.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Satpol PP	6	Unit	-	APB D	DAUM	6	Unit	Rp 1,280,000
5.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Satpol PP	1	Unit	-	APB D	DAUM	0	Unit	Rp -

1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum		86	%	644,018, 150	APB D	DAUM / DBHC HT	8 6	%	623,695,650
5.01.02.2. 01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)		86	%	470,027, 150	APB D	DAUM	8 7	%	446,664,650

1.05.02.2.0 1.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	17 9	Lapora n	101,500, 000	APB D	DAUM	1 7 9	Lapora n	Rp 105,000,000
-----------------------	---	--	--------------	---------	-------------	-----------------	----------	------	-------------	-------------	-------------------

1.05.02.2.0 1.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP	3	laporan	1,500,000	APB D	DAUM	3	Laporan	Rp 1,500,000
1.05.02.2.0 1.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	3	Dokumen	60,000,000	APB D	DAUM	3	Dokumen	Rp 60,000,000
1.05.02.2.0 1.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	2	Dokumen	50,000,000	APB D	DAUM	2	Dokumen	Rp 50,000,000

1.05.02.2.0 1.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satpol PP	0	Orang	-	APB D	DAUM	1 5	Orang	Rp 2,000,000
1.05.02.2.0 1.0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	4	Dokumen	253,027,150	APB D	DBHC HT	1	Dokumen	Rp 224,164,650
1.05.02.2.0 1.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Satpol PP	1	Dokumen	2,500,000	APB D	DAUM	1	Dokumen	Rp 2,500,000

1.05.02.2.0 1.0017	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Satpol PP	1	Laporan	1,500,000	APB D	DAUM	1	Laporan	Rp 1,500,000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup		77	%	169,991,000	APB D	DAUM / DBHC HT	100	%	173,031,000
1.05.02.2.0 2.00110	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	18	Laporan	169,531,000	APB D	DBHC HT	18	Laporan	Rp 169,531,000

1.05.02.2.0 2.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	0	Laporan	-	APB D	DAUM	3	Laporan	Rp 1,500,000
1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Satpol PP	4	Laporan	460,000	APB D	DAUM	4	Laporan	Rp 2,000,000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	jumlah aparatur yang ikut pelatihan		1	angka	4,000,000	APB D	DAUM	100	%	4,000,000
1.05.02.2.0 3.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	1	Laporan	4,000,000	APB D	DAUM	1	Laporan	Rp 4,000,000

1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana		100	%	105,000,000	APB D	DAUM	100	%	105,000,000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		100	%	105,000,000	APB D	DAUM	100	%	105,000,000
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Satpol PP	30	Orang	5,000,000	APB D	DAUM	30	Orang	Rp 5,000,000

1.05.03.2.0 3.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Satpol PP	80	Orang	100,000,000	APB D	DAU Earmarked	80	Orang	Rp 100,000,000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		85	%	321,137,500	APB D	DAUM	90	%	300,000,000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran		96.5	%	166,444,100	APB D	DAUM	97	%	144,720,000

1.05.04.2.0 1.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Satpol PP	2	Dokumen	28,862,500	APB D	DAUM	10	Dokumen	Rp 71,031,232
1.05.04.2.0 1.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Satpol PP	30	Laporan	118,830,000	APB D	DAUM	35	Laporan	Rp 33,700,000
1.05.04.2.0 1.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP	40	Dokumen	10,000,000	APB D	DAUM	30	Dokumen	Rp 22,150,000

1.05.04.2.0 1.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Satpol PP	6	Unit	3,831,600	APB D	DAUM	10	Unit	Rp 6,570,768
1.05.04.2.0 1.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Satpol PP	12	Orang	4,920,000	APB D	DAUM	45	Orang	Rp 11,268,000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		100	%	1,096,400	APB D	DAUM	100	%	2,090,000

1.05.04.2.0 2.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem ProteksiKebakaran	Satpol PP	2	Dokumen	846,400	APB D	DAUM	2	Dokumen	Rp 1,360,000
1.05.04.2.0 2.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	2	Dokumen	250,000	APB D	DAUM	2	Dokumen	Rp 730,000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran		100	%	150,000,000	APB D	DAU Earmarked	100	%	150,000,000

1.05.04.2.0 4.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Satpol PP	200	Orang	150,000,000	APB D	DAU Earmarked	200	Orang	Rp 150,000,000
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan		100	%	3,597,000	APB D	DAUM	100	%	3,190,000
1.05.04.2.0 5.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Satpol PP	6	Unit	3,597,000	APB D	DAUM	3	Unit	Rp 3,190,000
TOTAL						13,240,546,873					10,656,822,873

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yg sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diharapkan dapat menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan penuh tanggung jawab.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026, diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2026.

Bangkalan, 12 Agustus 2025

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



MOAWI ARIFIN, S. STP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19800212 199810 10001